
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Imas Sofiah¹, Ichi², Trisandi Eka Putri³

STIE Sutaatmadja^{1,2,3}

imas.sofiah96@gmail.com, iclh@stiesa.ac.id, trisandiekaputri@stiesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Populasi dalam penelitian ini adalah 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Subang. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin sehingga sampel yang diambil sebanyak 52 SKPD. Bagian akuntansi dipilih sebagai responden dalam penelitian. Metode pengambilan sampel menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 22 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Kata Kunci: *Komitmen Berorganisasi; Kualitas Laporan Keuangan; Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan; Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah*

DETERMINANT QUALITY FINANCIAL STATEMENTS GOVERNMENT OF SUBANG REGENCY

Abstract

This study aims to determine how the influence of understanding government accounting standards, organizational commitment and the application of the code of ethics by regional inspectorate auditors on the quality of financial statements in Subang Regency. The population in this study was 60 Regional Work Units (SKPD) in Subang Regency. Determination of sample size using the Slovin formula so that the samples taken were 52 SKPD. The accounting department was chosen as the respondent in the study. The sampling method uses proportionate stratified random sampling method. The data analysis technique used is multiple regression analysis with the help of IBM SPSS Statistics 22 for Windows. The results showed that partially or simultaneously variables of understanding government accounting standards, organizational commitment and application of the code of ethics by regional inspectorate auditors had a positive and significant effect on the quality of financial reports in Subang Regency.

Keywords: *Government Accounting Standards; Implementation of the Code of Ethics; Organizing Commitments; Quality of Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Adanya tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat terkait tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi pusat perhatian bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan adanya peningkatan tuntutan tersebut, telah mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yosefrinaldi, 2013). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adapun perwujudan dari akuntabilitas yaitu dengan membuat dan mempublikasikan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahannya selama periode tertentu (Arif, 2017). Sebagai alat pertanggungjawaban kegiatan dan kinerjanya kepada publik, maka laporan keuangan yang disusun pemerintah harus mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat terlihat dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2018 BPK mengungkapkan 9.808. temuan. Adapun jumlah temuan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah Temuan
1. Pemerintah Pusat	1.439
a. Pemeriksaan Keuangan	1.307
b. Pemeriksaan Kinerja	78
c. PDDT	54
2. Pemerintah Daerah	7.913
a. Pemeriksaan Keuangan	7.913
3. BUMN dan Badan Lainnya	456
a. Pemeriksaan Keuangan	35
b. Pemeriksaan Kinerja	71
c. PDDT	350
Total	9.808

Sumber : IHPS I (2018)

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa temuan yang terdapat pada Pemerintah Pusat sebanyak 1.439 temuan, Pemerintah Daerah sebanyak 7.913 temuan serta BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 456 temuan. Dari berbagai temuan audit yang ada, Pemerintah Daerah memiliki temuan paling banyak.

Berdasarkan IHPS I 2018, dari 542 LKPD Tahun 2017 tersebut, BPK memberikan 411 opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%), dan 18 opini TMP (3%). Secara detail, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%). Dengan demikian, opini yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten menjadi perhatian peneliti karena masih banyak yang belum mendapat opini WTP daripada Pemerintah Kota dan Provinsi.

Pada Provinsi Jawa Barat terdapat 28 entitas LKPD termasuk Pemerintah Provinsi Jabar itu sendiri, 25 dari LKPD meraih opini WTP sedangkan tiga entitas lainnya masih mendapatkan opini WDP. Adapun opini WDP tersebut didapatkan oleh Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Subang. Kabupaten Subang menjadi salah satu sorotan yang memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hal tersebut karena sebelumnya Kabupaten Subang telah 2 kali berturut-turut yaitu pada tahun 2014 dan 2015 mendapatkan opini *Disclaimer*. Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kab. Subang tidak menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis akrual serta belum melakukan proses konsolidasi laporan keuangan secara memadai.

Namun demikian, setelah dua tahun mendapatkan opini *disclaimer* akhirnya pada pelaporan anggaran tahun 2016 Pemerintah Kab. Subang berhasil meraih opini WDP. Kemudian untuk pemeriksaan tahun anggaran 2017 Kab. Subang masih mendapatkan opini WDP. Adapun pengecualian tersebut berupa pengambilalihan pasar baru yang belum diinventarisir piutangnya senilai Rp. 10,8 M dan penyusutan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 53 M. Agar dapat mempublikasikan laporan keuangan tanpa adanya pengecualian, maka diperlukan pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yaitu prinsip akuntansi yang menjadi acuan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Implementasi dari SAP berbasis akrual baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun sudah diberlakukan sejak tahun 2010. Alasan penerapan yang cukup lama ini mengindikasikan bahwa masih adanya institusi yang perlu diberikan pelatihan mengenai aturan baru.

Terkait dengan aturan baru, pemerintah Kabupaten Subang membuat Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang merupakan turunan dari implementasi PP No. 71 Tahun 2010. Pemahaman SAP ini sangat berkontribusi untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pemahaman individu dalam institusi terhadap SAP, maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh institusi tersebut (Erawati, 2016). Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2014) dan Putri, dkk. (2017) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman terhadap SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Selain pemahaman tentang SAP, faktor lain yang berkontribusi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu adanya komitmen berorganisasi dari individu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Komitmen berorganisasi akan menimbulkan *sense of belonging* pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggung jawab dan kesadaran dalam melaksanakan tugasnya serta termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi (Septarini dan Papilaya, 2016). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017) dan Agung dan Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki kualitas bukan sekedar dipengaruhi oleh pemahaman tentang SAP dan komitmen berorganisasi, adanya faktor lain berupa penerapan kode etik oleh Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah dalam lingkup Kabupaten/Kota. Pengawasan Intern merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pemantauan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh pegawai internal guna terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (PP No.60 tahun 2008).

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), adapun tujuan dari SPIP yaitu untuk meyakinkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintah telah efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan terciptanya keterandalan pelaporan keuangan. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka diterapkanlah pengawasan intern yang salah satunya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki tanggung jawab secara langsung kepada bupati/walikota. Dalam hal ini, Inpektorat Daerah (IRDA) sebagai inspektorat Kabupaten/kota diharapkan mampu memegang teguh kode etik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan terciptanya keterandalan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Airani dan Badera (2015) menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat. Keempat variabel dalam penelitian tersebut merupakan komponen dari kode etik APIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) yakni integritas, obyektifitas, kerahasiaan dan kompetensi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan terciptanya auditor inspektorat daerah yang mematuhi kode etik, maka semakin baik kinerja auditor tersebut. Semakin baiknya kinerja auditor dapat mengindikasikan terciptanya keandalan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2014). Dalam penelitian Sari, dkk. (2014) menggunakan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak akan efektif jika tidak memiliki komitmen berorganisasi. Komitmen berorganisasi merupakan tingkat keterlibatan pegawai dalam organisasi yang bersumber dari dalam diri pegawai sendiri. Keterlibatan ini merupakan simbol rasa memiliki pegawai terhadap pekerjaan dan organisasinya, sehingga jika tingkat komitmen berorganisasi tinggi maka laporan keuangan akan semakin berkualitas. Selain komitmen berorganisasi, kualitas laporan keuangan SKPD juga dipengaruhi oleh pengawasan dari luar SKPD, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten. Pengawasan Auditor inspektorat akan efektif jika auditor tersebut menerapkan etika dalam setiap pengawasan yang dilakukan terhadap SKPD. Kedua faktor tersebut sangat menarik untuk diteliti. Penelitian Sari, dkk. (2014) dilakukan pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

Pemerintah Kabupaten Subang merupakan entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang harus menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini diaudit oleh BPK RI. Entitas akuntansi dalam penelitian ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). SKPD merupakan organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD dalam satu kabupaten dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah/kabupaten.

Dari latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan Kab. Subang. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan Kab. Subang. Sehingga dari tujuan tersebut dapat diambil manfaat sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kab. Subang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Menurut Donaldson dan Davis (1997) dalam Puspitawati (2016) : “*Stewardship theory* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal.” *Stewardship theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa manajemen dipandang sebagai pihak yang memiliki integritas tinggi dan mampu melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna memenuhi kebutuhan *stakeholder* (Puspitawati, 2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan.

Komitmen Berorganisasi

Menurut Lubis (2014) komitmen berorganisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Adapun tiga komponen utama mengenai komitmen organisasi menurut Lubis (2011:55) adalah :

1. **Komitmen Afektif**
Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional atau psikologis terhadap organisasi.
2. **Komitmen Kontinyu**
Apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi membutuhkan gaji dan keuntungan – keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan organisasi tersebut.
3. **Komitmen Normatif**
Timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan.

Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah

Kode etik menurut Standar Audit APIP (2008) adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan pengawasan. Adapun maksud ditetapkannya Kode Etik APIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP. Adapun tujuan kode etik adalah:

1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

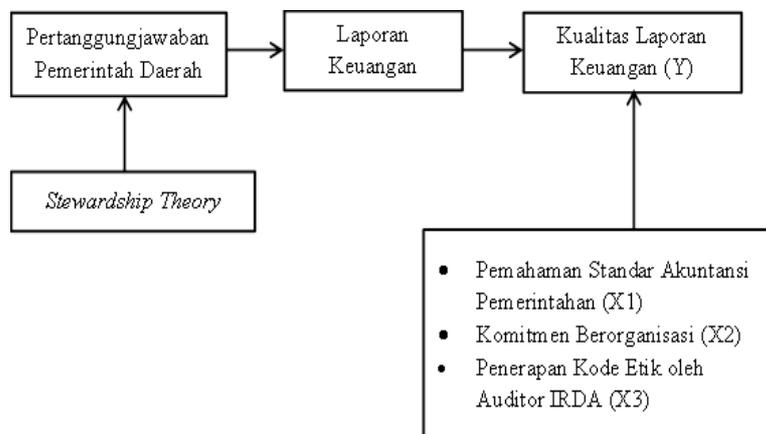
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, adapun prinsip-prinsip perilaku auditor adalah sebagai berikut :

1. Integritas
Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
2. Obyektivitas
Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
3. Kerahasiaan
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi
Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka implementasi dari teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah sebagai manajer yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk melaksanakan pelayanan publik diharapkan mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, salah satunya dengan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna yang tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan pemeriksa, kreditur serta pemerintah itu sendiri. Agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan pemahaman yang cukup terkait standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kemudian dapat didukung juga oleh pegawai yang memiliki komitmen berorganisasi yang tinggi serta peran aktif inspektorat daerah sebagai pengawas intern pemerintah yang mampu menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, SAP ini diturunkan dalam sebuah kebijakan akuntansi yang diatur melalui Peraturan Bupati No 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang. Dengan adanya kebijakan yang berpedoman pada SAP, maka laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat sesuai kebutuhan para pemakai. Penelitian Sari, dkk (2014) memberikan bukti bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian Putri, dkk. (2017) menemukan hasil bahwa secara parsial maupun simultan variabel pemahaman regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Pengaruh Komitmen Berorganisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Dengan terbentuknya komitmen berorganisasi, maka akan terciptanya kinerja yang baik dalam pekerjaannya. Karena komitmen berorganisasi sangat erat hubungannya dengan kinerja pegawai, semakin tinggi individu memegang komitmen, maka semakin baik pula ia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya (Errawati, 2016). Dengan demikian, apabila terciptanya komitmen berorganisasi yang tinggi dari bagian akuntansi diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutiana, dkk. (2017) serta Agung dan Gayatri (2018) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini:

H2: Komitmen Berorganisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Pengaruh Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Terciptanya peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan salah satu upaya dalam mendukung tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Salah satu tujuan dari SPIP yaitu terciptanya keterandalan laporan keuangan. Dalam hal mencapai tujuan tersebut, inspektorat daerah sebagai pengawas intern yang bertanggung jawab kepada bupati harus mentaati kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik APIP diatur berdasarkan PERMENPAN Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 yaitu terdiri dari integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Penelitian Airini dan Badera (2015) menyimpulkan bahwa keempat komponen kode etik yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan penelitian Setyowati, dkk. (2016) mendapatkan hasil bahwa peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inspektorat daerah (IRDA) sebagai APIP memiliki peran yang sangat penting sehingga apabila terbentuknya auditor IRDA yang berkode etik mampu mewujudkan terciptanya kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian:

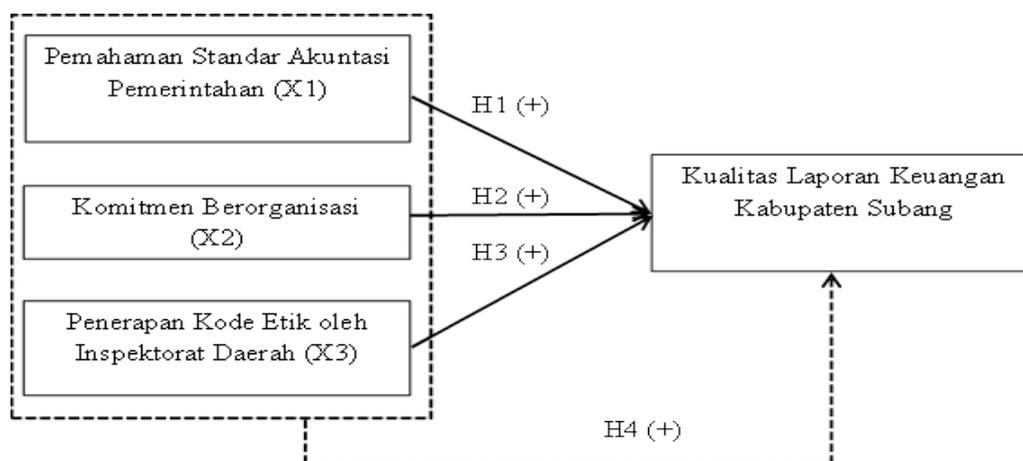
H3: Penerapan kode etik oleh auditor inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Berorganisasi dan Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Setelah dilakukan pengujian secara parsial, kemudian dilakukan pengujian secara simultan. Adapun hubungan dari ketiga faktor tersebut secara bersama-sama yaitu dengan terciptanya pegawai yang memiliki pemahaman terkait standar akuntansi pemerintah serta berkomitmen pada organisasinya mampu mendorong individu tersebut untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah akan dilakukan pengendalian oleh pengawas intern (inspektorat daerah). Diharapkan dengan terciptanya auditor inspektorat daerah yang selalu menerapkan kode etik dalam menjalankan tugasnya mampu mencapai tujuan pengendalian yakni keterandalan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H4 : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Dari uraian pengembangan hipotesis di atas, adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis pada populasi atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2016:12). Populasi dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Subang sebanyak 60 SKPD. Teknik pemilihan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 52 SKPD. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu bagian akuntansi di SKPD Kabupaten Subang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada reponden. Kuisioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu:

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemahaman tentang SAP adalah kemampuan individu untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Secara spesifik, pada Kabupaten Subang, peraturan tentang SAP dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang. Variabel ini diuji menggunakan 20 instrumen pertanyaan berupa pilihan ganda yang dikembangkan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang.

2. Komitmen Berorganisasi

Menurut Lubis (2014) Komitmen berorganisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi ini memiliki tiga komponen utama yaitu komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif. Diukur berdasarkan 9 pernyataan kuisioner dengan skala likert 5 point.

3. Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern Kabupaten/kota sudah seharusnya menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik APIP diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008. Berdasarkan PERMENPAN terdapat empat prinsip yang harus dipatuhi yaitu: Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Variabel ini diukur dengan menggunakan 17 item pernyataan kuisioner dengan skala *likert 5 point*.

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud “laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan sehingga dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan”. Informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif berupa relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Ghozali, 2013). Adapun persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

X₂ = Komitmen Berorganisasi

X₃ = Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisioner yang telah disebar. Penyebaran kuisioner dilakukan terhitung tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 25 April 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Subang. Adapun alasan dipilihnya SKPD sebagai sampel penelitian adalah karena keuangan pemerintah daerah disebar dan dikelola oleh badan, dinas, kantor dan kecamatan-kecamatan yang pada akhirnya dilakukan konsolidasi menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah daerah (Kab. Subang). Responden yang dipilih untuk mewakili mengisi kuisioner yaitu bagian akuntansi yang bekerja di SKPD.

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki, dengan usia 30-50 tahun, tingkat pendidikan sarjana dan pengalam bekerja lebih dari 5 tahun. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Uji Normalitas

Data penelitian ini memiliki distribusi normal karena memiliki nilai signifikansi (0,2) lebih dari 0.05

2. Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan tidak ada kolerasi antar variabel bebas karena nilai tolerance dari setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang bernilai di bawah 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Adanya titik-titik yang menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Statistik deskriptif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sample Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 52 SKPD. Range teoritis antara 0-100. Range aktual 40. Minimal 50, maximal 90 dan mean 72,40 (3,62 jika skala 5). Standar deviasi 10,958 dan variance 120,089.
2. Sample Variabel Komitmen Berorganisasi terdiri dari 52 SKPD. Range teoritis antara 1-5. Range aktual 3,44. Minimal 1,56, maximal 5 dan mean 3,41. Standar deviasi 0,49 dan variance 0,24.
3. Sample Variabel Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah terdiri dari 52 SKPD. Range teoritis antara 1-5. Range aktual 2,76. Minimal 2,24 , maximal 5 dan mean 4,15. Standar deviasi 0,49 dan variance 0,24.
4. Sample Variabel Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang terdiri dari 52 SKPD. Range teoritis antara 1-5. Range aktual 2,44. Minimal 2,56, maximal 5 dan mean 4,08. Standar deviasi 0,58 dan variance 0,34.

Analisis Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari perhitungan regresi yang telah diolah maka diperoleh persamaan regresi linier menggunakan bantuan SPSS *for windows version 22* sebagai berikut:

$$Y = -8,555 + 0,168 X1 + 0,216 X2 + 0,375 X3 + e$$

Berdasarkan Uji statistik t maka pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X1), komitmen berorganisasi (X2) dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *R Square* adalah 0,675. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah memiliki pengaruh sebesar 67,5 % terhadap variabel kualitas laporan

keuangan Kabupaten Subang. Sedangkan sisanya sebesar 42,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil pengujian statistik, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Kab. Subang. Hal ini terbukti dari hasil pengujian diperoleh nilai regresi $\beta_1 = 0,168$, yang artinya apabila terjadi perubahan pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebesar 1% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kab. Subang sebesar 0,168 (karena nilai regresi β_1 positif). Sesuai dengan pengujian secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,144 lebih besar dari t_{tabel} 1,677, atau dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Dengan demikian, berarti bahwa **H1 diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari, dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta Putri, dkk (2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial maupun simultan variabel pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Komitmen Berorganisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel komitmen berorganisasi dengan variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Hal ini terbukti dari hasil pengujian diperoleh nilai regresi $\beta_2 = 0,216$. Hal ini berarti bahwa jika terjadi perubahan komitmen berorganisasi sebesar 1% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang sebesar 0,216 (karena nilai regresi β_2 positif). Sesuai dengan pengujian secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,191 lebih besar dari t_{tabel} 1,677, atau dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa komitmen berorganisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Dengan demikian, berarti bahwa **H2 diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwanda (2015), Mutiana, dkk (2017) serta Agung dan Gayatri (2018) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan tumbuhnya komitmen berorganisasi dari setiap anggota organisasi maka semakin tercapainya tujuan organisasi dalam hal ini semakin berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan.

Pengaruh Penerapan Kode Etik Oleh Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah dengan variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Hal ini terbukti dari hasil pengujian diperoleh nilai regresi $\beta_3 = 0,375$. Hal ini berarti bahwa jika terjadi perubahan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang sebesar 0,375 (karena nilai regresi β_3 positif). Sesuai dengan pengujian secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,998 lebih besar dari t_{tabel} 1,677, atau dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa penerapan kode etik oleh auditor inspektorat

daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Dengan demikian, berarti bahwa **H3 diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyowati, dkk. (2016) serta Tambingon, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian Simangunsong (2015) juga menunjukkan hasil bahwa peran dari internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, adanya auditor IRDA yang taat terhadap kode etik diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor dalam pengawasan intern sehingga tercapainya keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membuktikan bahwa penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Berorganisasi dan Penerapan Kode Etik oleh Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan mengenai variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 33,203 lebih besar dari f_{tabel} 2,80 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh inspektorat daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Hal itu berarti bahwa **H4 diterima**.

Apabila dilihat dari nilai koefisien determinasi memiliki nilai sebesar 67,5% yang berarti bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh sebesar 67,5% dalam mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan. Dengan adanya pegawai akuntansi yang memahami standar akuntansi pemerintahan dan memiliki komitmen berorganisasi yang tinggi serta didukung oleh pengawas intern yang berkode etik diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang, komitmen berorganisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang, penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang. Secara simultan pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen berorganisasi dan penerapan kode etik oleh auditor inspektorat daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Subang.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini penelitian ini hanya menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuisioner. Dengan demikian, kemungkinan masih ada kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud untuk menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah untuk peneliti yang tertarik dengan tema yang sama, diharapkan dapat menambahkan metode wawancara serta memperluas cakupan geografis sampel penelitian dan juga

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, misalnya gaya kepemimpinan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan statistic deskriptif diketahui bahwa faktor komitmen berorganisasi memiliki rata-rata paling rendah diantara variabel independen yang lainnya yaitu 3,41. Peningkatan komitmen berorganisasi dapat dilakukan dengan cara menerapkan merit system bagi ASN di Kabupaten Subang. Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik juga dapat meningkatkan komitmen berorganisasi. Hal lain yang dapat meningkatkan komitmen berorganisasi adalah adanya peningkatan kompetensi ASN yang berkarakter dan adanya perencanaan penganggaran yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. Madiguna dan Gayatri. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.23.2. Hal: 1253-1276.
- Andrea Cirstea. (2014). *The Need for Public Sector Consolidated Financial Statements*. Procedia Economics and Finance. Vol. 15. Pages 1289-1296.
- Ariani, K.G, dan Badera, I D.N. (2015). *Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.10.(1). Hal: 182- 198.
- Arif, Rahman. (2017). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*.
- BPK RI. (2017). *IHPS II Tahun 2017*. Jakarta : BPK RI.
- BPK RI. (2018). *IHPS I Tahun 2018*. Jakarta :BPK RI
- Christopher T. Edmonds at all. *Does timeliness of financial information matter in the governmental sector?* Journal of Accounting and Public Policy: Vol.36 Issue 2. March-April 2017. Pages 163-176.
- Dodopo, Y., Jullie, J.S dan Jantje, J.T. 2017. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, Dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara*. Universitas Sam Ratulangi.
- Farid, Syahril. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)*. Universitas Negeri Padang. Jurnal Akuntansi. Vol.1(2).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kiranayanti, Ida A.E dan Erawati, Ni M.A. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.2. Hal. 1290-1318.
- Lubis, A. Irfan. (2014). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nunuy Nur Afiah, Peny Cahaya Azwari. (2015). *The Effect of the Implementation of Government Internal Control Systems (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera*. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Pages 811-818.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang.
- Putri, I.D. Rahayu, S. Nurbaiti, A. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. e-Proceeding of Management : Vol.4, No.2. Hal:1732.
- Puspitawati, Desi. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis. Universitas Lampung.
- Sari, Ni Putu Y.M.M, I Made.P.A, dan Edy. S. (2014). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol.2 (1).
- Setyowati, Lilis., Wikan, I. Pratiwi, R.D. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*. Jurnal Kinerja. Vol.20 (2). Hal: 179-191.
- Septarini, D.F dan Pampilaya, F. (2016). *Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.VII, No. 2. Hal: 100-116.
- Simangunsong, Rosma. (2014). *The Impact of Internal Control Effectiveness and Internal Audit Role toward the Performance of Local Government*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.5. (7).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadilaga, Pratama and Mulyani.(2015).*Good Governance Implementation in Public Sector:Exploratory Analysis of Government Financial Statement Disclosures Across ASEAN Countries*.Procedia – Social and Behavioral Sciences.Vol. 211. Pages 513-518.
- Suwanda, Dadang. (2015). *Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.6. (4).
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tambingon, H.N. Yadiati, W. dan Kewo. C.L. (2018). *Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol.8.
- Tanjung, A. Hafiz. (2014). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- Yanti, Sumiyanti. (2016). *Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa*. Skripsi. STIE Sutaatmadja. Tidak Dipublikasikan.
- Yosefrinaldi. (2013). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.